

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Novel Kemi merupakan bentuk politik identitas Adian Husaini sebagai seorang Cendekiawan Muslim. Di dalam novel ini tergambar dengan jelas bagaimana para tokoh menjadi representasi dari ideologi yang coba dihalau oleh Adian. Tokoh Rahmat sebagai representasi dari Islam Ahlusunnah wal Jamaah. Tokoh Kemi sebagai representasi dari Islam Liberal. Tokoh Siti representasi Islam yang menang atas feminis radikal. Politik identitas tersebut lebih menekankan pada menggunakan identitas yang dimiliki sebagai seorang muslim menjadi cara pandang dalam menjalankan kehidupan.

Di dalam novel tersebut, Adian membagi empat pokok gagasan politik identitasnya ke dalam beberapa alur perdebatan. Alur perdebatan pertama terjadi pada tokoh Rahmat dan Kemi. Alur perdebatan kedua terjadi pada tokoh Bejo dan Doktor Ita. Alur perdebatan ketiga terjadi pada tokoh Rahmat dan Pak Malikan. Alur perdebatan terakhir terdapat pada konflik internal Siti. Gambaran politik identitas yang terdapat dalam tiap teks perdebatan antar tokoh memiliki makna tersirat dan tersurat sekaligus. Dan penelitian ini membantu untuk mengungkap makna tersirat yang ada dalam tiap teks perdebatan hingga merujuk pada kognisi sosial Adian.

Keempat pokok gagasan tersebut adalah bahwa Islam substantif tidak mengabaikan Islam simbolik. Bahwa Islam adalah keadilan gender yang selama ini dicari kaum feminis. Bahwa liberalisme bukan sebuah solusi dalam konflik umat beragama. Bahwa Islam adalah kebenaran yang akan menang pada akhirnya. Keempat gagasan pokok itu terangkum dalam sebuah kognisi sosial bertema Islam merupakan sebuah ideologi final yang patut diperhitungkan kekuatan logikanya. Kognisi sosial itulah politik identitas sebenarnya yang ingin disampaikan Adian.

Novel ini memiliki kaitan secara tidak langsung terhadap politik identitas saat ini. Saat Adian membuat novel ini adalah saat di mana pamarjinalan kaum Muslim masih terjadi dalam batas media tulisan. Sementara pamarjinalan kaum Muslim saat ini sudah bisa disaksikan secara terang-terangan melalui siaran berita berbentuk video. Siaran yang berisi opini ini yang makin memperluas Islamophobia di dalam tubuh masyarakat Indonesia. Jika dulu ketika Adian membuat ini kaum Muslim masih termarjinalkan secara pemikiran, maka saat ini politik identitas yang terjadi adalah ketika kaum Muslim dimarjinalkan secara terang-terangan layaknya orang yang dipersekusi.

5.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian ini, peneliti menyarankan masyarakat untuk tidak resisten terhadap perbedaan ideologi. Jangan sampai kita terhasut oleh entitas politik yang sengaja mengadu domba masyarakat Indonesia lewat siaran berita hanya

demokratik mempertahankan kekuasaannya. Ketika kita berbicara tentang toleransi maka kita juga harus melakukan toleransi itu. Toleransi bukan berarti tidak mengkritik. Mengkritik bukan berarti tidak toleransi. Namun mari gunakan cara dan bahasa yang bijak untuk melakukan kedua hal tersebut.

Untuk generasi muda saran sebagai berikut:

1. Ketika kalian menerima informasi, maka harus kalian cerna terlebih dahulu. Sehingga kalian dapat menanggapi dengan bijak suatu isu. Apalagi isu yang tersebar di media sosial.
2. Diharapkan kepada generasi muda untuk tidak langsung menjustifikasi suatu kelompok. Kita harus melihat alasan dibalik eksistensi mereka. Alasan kenapa mereka memilih identitas itu. Sehingga kita tidak akan mudah terprovokasi. Kalian harus belajar untuk bijaksana karena kalian yang selanjutnya akan memegang tampuk pemerintahan negara ini.

Untuk ormas Islam saran sebagai berikut:

1. Jika memang ormas Islam merasa ada kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka alangkah lebih baik dan bijaknya untuk tidak menghakimi. Perundingan dalam duduk bersama adalah jalan terbaik agar tidak menimbulkan kekerasan, traumatik, dan skeptik terhadap ormas Islam.

2. Mengkritik boleh tapi tetap lakukan dengan adab yang baik. Para ulama pun sangat menekankan pentingnya adab dalam setiap ilmu yang mereka ajarkan.

Untuk Pemerintah saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bersikap lebih adil dan bijak dalam menyikapi isu sosial masyarakat. Jangan sampai kehilangan integritas hanya karena haus kekuasaan. Ketika memang mendapat kritikan, maka seyogyanya untuk menerima, karena tidak ada pemerintahan yang benar-benar berjalan dengan sempurna.
2. Pemerintah harus lebih melindungi kebebasan warga negaranya dalam menjalankan kegiatan simbolik keagamaan. Jika ingin menyelesaikan masalah, maka benar-benar dipahami dulu akarnya, bukan langsung memotong dahannya. Yang malah akhirnya menimbulkan kegaduhan sendiri. Meskipun negara Indonesia bukan negara Islam, setidaknya umat Muslim masih menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang hak kewarganegaraannya pun harus dipenuhi oleh negara.
3. Pemerintah harus tegas jika memang ingin mempertahankan ideologi Pancasila. Silahkan melakukan perundingan politik, namun tetap harus mengedepankan hak warga negara. Jika ideologi yang diusung saja bisa dikesampingkan dalam sebuah perundingan politik, maka tidak perlu heran jika nanti warganya tidak akan percaya dengan apa yang diucapkan oleh pemerintah.